



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANWAR SANUSI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 519555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.650.100.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 1122 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 731.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/296 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 626 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, WARISAN Rp. 219.100.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 632 m2/400 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, WARISAN Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **77.700.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 125 SKUTIK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000



3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000

4. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
47.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.012.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.432.203.899

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 18.172.203.899

III. HUTANG Rp. 1.100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 17.072.203.899

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.